

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014-2019**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
2014**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	4
2.2. Sumber Daya SKPD	14
2.3. Kinerja SKPD	15
2.3.1. Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan	15
2.3.2. Kinerja Pelayanan SKPD	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1. Identifikasi Permasalahan	23
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Terkait	27
3.4. Telaahan RTRW Provinsi Jatim dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Isu-isu Strategis	35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	42
4.1. Visi dan Misi	42
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	42
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	43
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	48
BAB VII PENUTUP	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik senantiasa mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan, kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2019, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Jawa Timur maupun isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program dan

kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah:

- a. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2019;
- b. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014–2019;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

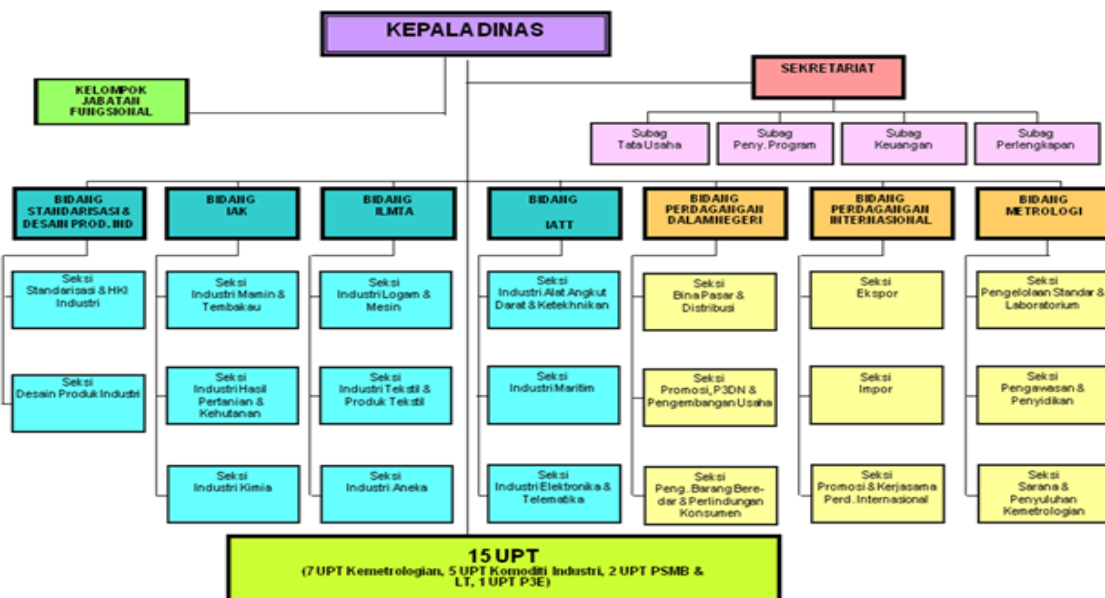
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Sesuai PERDA Provinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2008, Bab XX, Bagian Kesatu, Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa "*Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan*".

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 96 tahun 2008, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 1 unit eselon II, 23 unit eselon III terdiri dari 1 Sekretariat, 7 Bidang, 15 UPT, dan kelompok fungsional sebagaimana bagan berikut:



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

- 1) ***Sekretariat***, bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
 - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
 - j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

- 2) ***Bidang Standarisasi dan Desain Produk Industri***, bertugas menyusun program kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan standarisasi, fasilitasi HKI dan desain industri, melaksanakan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi, HKI dan desain industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang standardisasi , HKI dan desain produk industri
 - b. penyusunan rumusan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri.

- c. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan standardisasi , HKI dan desain produk industri
 - d. pelaksanaan pembinaan standardisasi, HKI dan desain produk industri;
 - e. pelaksanaan kerjasama standardisasi, HKI dan desain produk industri;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 3) ***Bidang Industri Agro dan Kimia***, bertugas menyusun program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis dibidang industri agro dan kimia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri agro dan kimia.
 - b. pelaksanaan penyusunan rumusan teknis pembinaan, penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang industri agro dan kimia;
 - c. pelaksanaan penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri agro dan kimia;
 - d. pelaksanaan pembinaan dibidang industri agro dan kimia;
 - e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri agro dan kimia;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri agro dan kimia.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 4) ***Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka***, bertugas menyusun program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis dibidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri logam mesin tekstil dan aneka
 - b. penyusunan rumusan teknis pembinaan, penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka.
 - c. penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri logam, mesin , tekstil dan aneka.
 - d. penyiapan bahan pembinaan dibidang industri logam , mesin , tekstil dan aneka.
 - e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri logam , mesin , tekstil dan aneka.
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri logam , mesin , tekstil dan aneka.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 5) ***Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika***, bertugas menyusun program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis dibidang industri alat transportasi, elektronika dan telematika. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri alat transportasi , elektronika dan telematika
 - b. penyusunan rumusan teknis pembinaan , penyiapan perijinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang industri Alat Transportasi , Elektronika dan Telematika
 - c. penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana ,usaha dan produksi di bidang industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

- d. penyiapan bahan pembinaan dibidang industri Alat Transportasi , Elektronika dan Telematika
 - e. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 6) ***Bidang Perdagangan Dalam Negeri***, bertugas menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri
 - b. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pemberian ijin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan
 - c. pelaksanaan koordinasi pengendalian, fasilitasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan
 - d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
 - e. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga
 - f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 7) ***Bidang Perdagangan Internasional***, bertugas menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan / mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan

internasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan Internasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perdagangan internasional.
- b. pelaksanaan bimbingan di bidang perdagangan internasional.
- c. pelaksanaan pelayanan dibidang ekspor dan pengendalian impor.
- d. pelaksanaan penyebaran informasi , promosi dan kerjasama perdagangan internasional.
- e. pelaksanaan koordinasi dibidang perdagangan internasional
- f. pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan internasional
- g. pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8) ***Bidang Metrologi***, bertugas perencanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Metrologi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrologian
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian SDM metrologi.
- c. pelaksanaan koordinasi , rekomendasi penilaian standard ukuran dan laboratorium Kabupaten/Kota.
- d. pelaksanaan verifikasi standard satuan ukuran milik Propinsi dan Kabupaten/Kota,
- e. penyelenggaraan interkomparasi skala propinsi, penyelenggaraan fasilitasi, kerjasama metrologi legal,.
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI .
- g. pelaksanaan pembinaan pembuat, importir UTTP dan rekomendasi pelaksanaan permohonan ijin type dan ijin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan ijin tanda pabrik dan reparatir UTTP.
- h. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak UUML/Perda
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, terdapat 15 UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya ;
2. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Jember ;
3. UPT Kemetrollogian Surabaya ;
4. UPT Kemetrollogian Malang ;
5. UPT Kemetrollogian Jember ;
6. UPT Kemetrollogian Kediri;
7. UPT Kemetrollogian Madiun ;
8. UPT Kemetrollogian Bojonegoro ;
9. UPT Kemetrollogian Pamekasan ;
10. UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo ;
11. UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Surabaya ;
12. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan ;
13. UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan ;
14. UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya;
15. UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor Surabaya.

dengan tugas dan fungsi masing-masing UPT adalah sebagai berikut :

- 1) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis , kalibrasi, sertifikasi mutu , pembinaan dan pengawasan mutu
 - b. pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis , kalibrasi, sertifikasi mutu , pembinaan dan pengawasan mutu

- c. pelaksanaan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standard Nasional Indonesia (SPPT- SNI).
 - d. pelaksanaan pengujian mutu barang yang beredar di pasaran
 - e. pelaksanaan pembinaan teknis dan penyeliaan dibidang mutu sesuai dengan Standar Nasional/Internasional dan atau Standar lain.
 - f. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu tembakau berikut sarananya
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutu tembakau dan hasil olahannya
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 2) ***UPT Kemetrolagian*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Kemetrolagian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja;
 - b. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
 - d. penyusunan rencana/program tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP);
 - e. pelaksanaan tera/ tera ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 3) ***UPT Industri Logam dan Perakayasaan*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis , pembinaan, alih teknologi, perakayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud UPT Industri Logam dan Perekayasaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan
- b. pelayanan teknis industri logam dan perekayasaan
- c. pembinaan dan pelatihan dibidang industri logam dan perekayasaan
- d. pembinaan kawasan lingkungan industri kecil
- e. pengembangan dibidang industri logam dan perekayasaan
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4) ***UPT Industri Kulit dan Produk Kulit*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Industri Kulit dan Produk Kulit mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan
- b. pelayanan teknis industri kulit dan produk kulit
- c. pembinaan dan pelatihan dibidang industri kulit dan produk kulit
- d. pembinaan kawasan lingkungan industri kecil
- e. pengembangan dibidang industri kulit dan produk kulit
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5) ***UPT Industri Kayu dan Produk Kayu*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Industri Kayu dan Produk Kayu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan
- b. pelayanan teknis industri kayu dan produk kayu
- c. pembinaan dan pelatihan dibidang industri kayu dan produk kayu
- d. pengembangan dibidang industri kayu dan produk kayu
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 6) ***UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan
 - b. pelayanan teknis industri makanan minuman dan kemasan
 - c. pembinaan dan pelatihan dibidang industri makanan minuman dan kemasan
 - d. pengembangan dibidang industri makanan minuman dan kemasan
 - e. pelaksanaan pelayanan masyarakat
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 7) ***UPT Aneka Industri dan Kerajinan*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Aneka Industri dan Kerajinan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan
 - b. pelayanan teknis Aneka Industri dan Kerajinan
 - c. pembinaan dan pelatihan dibidang Aneka Industri dan Kerajinan
 - d. pengembangan dibidang Aneka Industri dan Kerajinan
 - e. pelaksanaan pelayanan masyarakat
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 8) ***UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor*** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan, pelatihan dan fasilitasi promosi ekspor, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas ketatausahaan
- b. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang ekspor
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ekspor
- d. pelaksanaan fasilitasi promosi ekspor
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2.2. SUMBER DAYA SKPD

Dari sisi sumber daya kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan akhir tahun 2013 tercatat sebanyak 544 orang, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2013

NO	URAIAN	Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				Total
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kadis															1		1
2	Sekretariat			1		9	4			8	20	2	6	2	1			53
3	Bidang SDPI					1	1				3	4	4	2	1			16
4	Bidang IATT									1	6	4	9	3	1			24
5	Bidang ILMTA						1	1			5		4	2	2			15
6	Bidang IAK						4			4	8	2		2	1	1		22
7	Bidang PDN				1	1				3	9	2	5	1	1			23
8	Bidang PI						1			1	13	7	1	4				27
9	Bid. Metrologi									4	6	4	4	1				19
10	UPT Industri Logam		1	4	1	15	27			1	1		3	1				54
11	UPT Industri Kulit			1		4	8	1				1	2	1				18
12	UPT Industri Kayu		3	1		2	6			1	1		2	1	1			18
13	UPT Industri Mamin					2				1			3	1				7
14	UPT Aneka Industri	1	1	1		3	8			2	4	2	2	1	1			26
15	UPTK Surabaya			1	1	3	2			4	6	10	8		1			36
16	UPTK Malang						6			3	3	3	6	2	1			24
17	UPTK Kediri			1		1	3			1	11	4	2	1	1			25
18	UPTK Madiun					2	2			1	4	4	4	1	1			19
19	UPTK Jember					1	1	1		4	7	1	5	2				22
20	UPTK Bojonegoro					2	1			1	2	4	5	2				17
21	UPTK Pamekasan					1				1	2	3	2					9
22	UPT PSMB-LT Sby			1				1		2	9	4	8	2	1			28
23	UPT PSMB-LT Jbr					1	4		1	1	1		3	2	1			14
24	UPT P3 E Surabaya						1			1	13	7	1	4				27
	JUMLAH	1	5	11	3	48	80	4	1	45	134	68	89	38	15	1	0	544

Sedangkan dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur samapai dengan akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 377.472.917.460,00 dengan perincian sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Rincian Aset Tetap Disperindag Prov Jatim
(per 31 Desember 2013)

No	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp.)
1	Tanah	73.625.440.000,00
2	Peralatan dan Mesin	199.191.027.407,00
3	Gedung dan Bangunan	99.720.482.054,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.165.962.910,00
5	Aset Tetap lainnya	72.100.900,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	977.904.189,00
	Jumlah	377.472.917.460,00

2.3. KINERJA SKPD

2.3.1. Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan

Pada tahun 2013, seluruh sektor lapangan usaha di Jawa Timur mengalami pertumbuhan positif apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, diantaranya sektor industri pengolahan tumbuh sebesar **5,59%** dan sub sektor perdagangan tumbuh sebesar **8,48%**. Kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama di tingkat Nasional, dimana sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,56% dan sektor perdagangan hotel restoran tumbuh sebesar 6,52%.

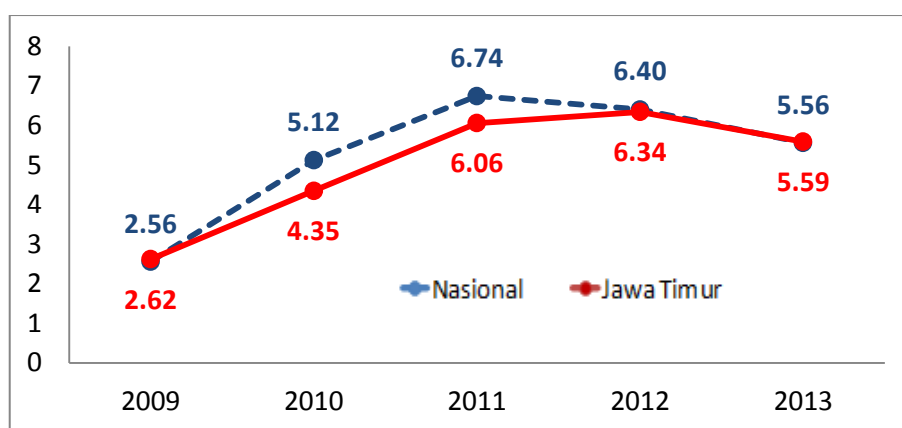
Penopang utama struktur ekonomi Jawa Timur pada tahun 2013 adalah Sektor Industri Pengolahan dan Sub Sektor Perdagangan, yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar Rp. 302,31 triliun (**26,60%**) dan Rp. 284,85 triliun (**25,07%**) terhadap total PDRB Jawa Timur, dan apabila digabungkan maka kedua sektor tersebut mampu memberikan kontribusi sebesar **51,67%** terhadap total PDRB Jawa Timur.

2.3.1.1. Industri

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena di samping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan ke

depan (*forward linkage*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang relatif banyak. Hasil penghitungan tahun 2013 total nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku sebesar Rp 302,31 triliun, atau setara dengan 26,60 persen dari total nilai PDRB Jawa Timur. Pertumbuhan sektor ini di tahun 2013 sebesar 5,59 persen, melamban dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,34 persen.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan Jawa Timur pada periode 2009-2013 menunjukkan tren yang meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif menyamai tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan di tingkat Nasional, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut:



Sumber: BPS

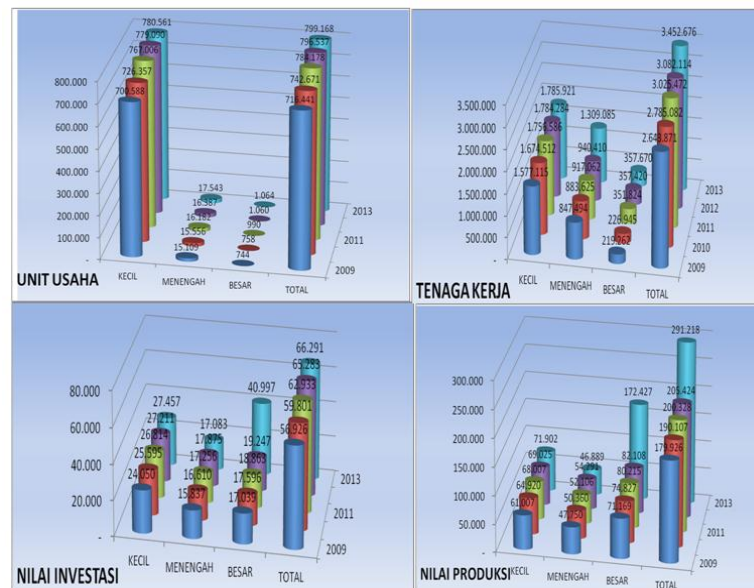
Gambar 2. 2
Grafik Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)

Jumlah industri di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,63 persen. Dalam kurun waktu 2009-2013 tersebut, tercatat jumlah industri pada tahun 2009 sebanyak 716.441 perusahaan, tahun 2010 menjadi 742.671 perusahaan, tahun 2011 menjadi 783.955 perusahaan, tahun 2012 berkembang menjadi 796.515 perusahaan serta pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 799.168 perusahaan. Selengkapnya terkait jumlah industri dan pertumbuhannya tertera seperti dalam tabel 2.3 dan gambar 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Industri di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Perusahaan/Industri	716.441	742.671	783.178	796.537	799.168
Pertumbuhan (%)	2,00	3,66	5,45	1,71	0,33

Sumber: Dinas Perindag Provinsi Jatim



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

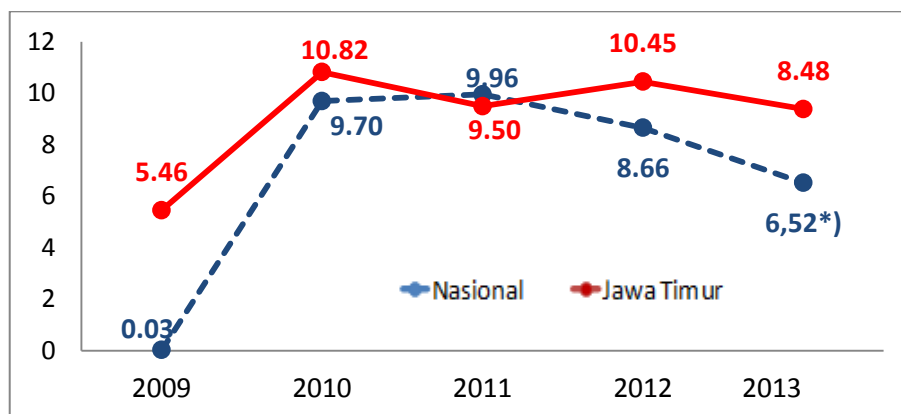
Gambar 2.3
Grafik Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri

Berdasar tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa meskipun dari tahun ke tahun jumlah industrinya terus mengalami pertumbuhan, namun jumlah pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir terus mengalami perlambatan. Melambatnya pertumbuhan industri ini lebih disebabkan dari faktor krisis terutama sebagai akibat dari gejolak perekonomian global yang berpengaruh langsung terhadap penurunan investasi dan pada akhirnya juga memperlambat perkembangan industri baru. Gejolak ekonomi juga ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang berpengaruh pada kinerja industri pengolahan berbahan baku impor. Melambatnya pertumbuhan industri dalam kaitannya dengan gejolak perekonomian global mengindikasikan bahwa Industri di Jawa Timur masih tinggi tingkat ketergantungannya dengan input produksi dari bahan baku impor. Di sisi lain terindikasi pula masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk, hambatan peningkatan efisiensi produksi serta efisiensi biaya transaksi yang juga relatif masih rendah.

2.3.1.2. Perdagangan

Pertumbuhan sub sektor perdagangan Jawa Timur pada periode 2009-2013 menunjukkan tren yang relatif meningkat, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sub sektor perdagangan di tingkat Nasional, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.4 berikut:



Keterangan : *) sektor PHR
Sumber: BPS

Gambar 2.4
Grafik Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan (%)

Jika dilihat dari PDRB menurut penggunaan, terindikasi bahwa kinerja perdagangan yang tercermin dari defisit/surplus nett ekspor dari tahun 2010 - 2013 mengalami surplus dan cenderung mengalami pertambahan nilainya. Tahun 2013 surplus net-ekspor perdagangan barang dan jasa Jawa Timur sebesar Rp 53,728 Triliun (merupakan nilai terbesar dalam 5 tahun terakhir). Selengkapnya terkait kinerja perdagangan ini dapat dilihat seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Kinerja Perdagangan Jawa Timur Tahun 2010-2013

No	Kinerja	Tahun (Rp Triliun)				
		2009	2010	2011	2012	2013
I.	Ekspor	323,341	375,176	439,972	523,658	585,517
a.	Antar Negara	144,542	169,423	200,500	222,170	239,495
b.	Antar Provinsi	178,799	205,753	239,472	301,488	346,021
II.	Impor	288,534	340,140	405,395	473,206	531,788
a.	Antar Negara	122,066	155,717	196,641	234,573	256,183
b.	Antar Provinsi	166,468	184,423	208,754	238,633	275,604
Surplus		34,807	35,036	34,576	50,451	53,728

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Besarnya nilai surplus net ekspor perdagangan barang dan jasa tersebut berpengaruh pada nilai akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Berdasar besaran nilai itu pula pada akhirnya mulai tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa

Timur membuka Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di Provinsi lain, di mana hingga tahun 2013 berhasil membuka 26 KPD.

2.3.2. Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

MISI 1 :							
Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri							
TUJUAN 1 :							
Meningkatkan daya saing industri manufaktur							
SASARAN STRATEGIS 1 :							
Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah, nilai tambah industri berbasis sumber daya alam, kapasitas teknologi industri dan kualitas SDM							
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian					% Capaian
	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1) Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	6,5	2,62	4,35	6,06	6,34	5,59	86
2) Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	27	28,14	27,49	27,13	27,11	26,6	98,52
3) Persentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Terhadap Total Ekspor Non Migas Jawa Timur	83	89,96	92,17	93,34	91,82	90,76	109,35
4) SDM IKM terlatih	5.250	1.904	2.673	4.242	8.643	9.794	186,55
5) Meluasnya jaringan pasar industri kecil dan	375	241	432	325	360	336	89,6

menengah							
----------	--	--	--	--	--	--	--

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing							
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian					% Capaian
	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1) IKM bersertifikat SNI	7	1	3	3	6	7	100
2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	840	215	273	425	749	905	107,74
3) Desain produk industri	650	62	168	564	746	865	133,08
4) SDM IKM terlatih bidang desain kemasan	1.175	-	300	1,135	994	1373	116,85
5) Perusahaan bersistem mutu (ISO, HACCP, GMP)	16	7	9	11	6	16	100
6) Permodalan bagi IKM	1.010	898	922	962	982	1044	103,37

MISI 2 : Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas							
TUJUAN 2 : Meningkatkan kinerja ekspor non migas							
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya kinerja ekspor non migas yang berdaya saing, dan terciptanya pengendalian impor.							
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian					% Capaian
	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1) Calon eksportir baru	810	540	600	750	750	875	108,02
2) Surat Keterangan Asal (SKA) diterbitkan tepat waktu	108.000	102.936	111.122	147.052	116.422	134.183	124,24
3) Penghargaan Eksportir berprestasi (<i>Kriteria : berkinerja, Pembangun merek global, Usaha Kecil Menengah Ekspor, Barang dan Jasa Ekonomi Kreatif</i>)	12	12	8	12	11	12	100
4) Nilai Ekspor bersih perdagangan (Milliar US\$)	1,6	1,35	1,43	0,64	-2,59	-3,16	-197,5

5) Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor	262	148	158	243	547	374	142,75
6) Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas	17,5	-6,46	32,98	26,21	-13,02	-3,03	-17,31

MISI 3 : Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri							
TUJUAN 3 : Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri							
SASARAN 4 : Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, serta wira usaha baru sektor perdagangan							
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian					% Capaian
	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1) Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan	9,5	5,46	10,82	9,5	10,45	8,48	89,26
2) Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jatim	23,75	22,71	23,58	23,95	24,32	25,07	105,58
3) Persentase Pertumbuhan Nilai Transaksi Pasar Lelang	10	15,15	11,52	-38,15	-46,74	59,84	598,4
4) Inflasi terkendali	5 ± 1	3,62	6,96	4,09	4,5	7,59	0
5) Kantor perwakilan dagang Jatim di Provinsi Mitra (Pembukaan KPD)	9	0	4	6	5	11	122,22
6) % Pertumbuhan perdagangan antar wilayah/antarpulau antar provinsi	16,5	14,13	18,93	21,31	20,79	14,77	89,52
7) Resi gudang	225	0	14	84	85	116	51,56
8) Akses informasi dan perluasan jaringan pasar dalam negeri	35	95	100	110	115	144	411,43

MISI 4 : Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							
TUJUAN 4 : Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							
SASARAN 5 : Meningkatnya Penguatan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang, ketrologian serta pengawasan perdagangan barang dan jasa ilegal							
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi/Capaian					% Capaian
	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
1) Indeks Kepuasan Masyarakat	77,4	76,5	76,7	76,9	77,2	77,4	100
2) % Peningkatan UTTP bertanda tera sah	2,1	1.318.783*	-5,22	-7,53	-11,95	1,37	65,24
3) Pertumbuhan kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP)	20	4.259**	6,1	46,82	-24,24	20,59	102,95
4) Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk	3,75	7.992***	8,6	-19,2	-13,85	10,89	290,4

Keterangan :

*) Jumlah UTTP bertanda tera sah

**) Jumlah Kalibrasi

***) Jumlah Sertifikasi

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

3.1.1. Permasalahan Terkait Urusan Perdagangan

Beberapa permasalahan terkait urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri
- b. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)
- c. Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli

3.1.2. Permasalahan Terkait Urusan Perindustrian

Beberapa permasalahan terkait urusan perdagangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor
- b. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk
- c. Hambatan peningkatan efisiensi produksi,
- d. Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**.

Jawa Timur Lebih Sejahtera adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu

diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

Jawa Timur Lebih Berkeadilan adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya, dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan. Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau yang termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jawa Timur Lebih Mandiri adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan "Berdikari" (*Berdiri di atas Kaki Sendiri*), dan secara pro-aktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawa Timur Lebih Berdaya Saing adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif

(*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manuskasaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi *ASEAN Economic Community* pada 2015. Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi *ASEAN Socio-Cultural Community* pada 2015, agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan.

Jawa Timur Lebih Berakhlak adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
- c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
- d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kedua, yaitu "Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi". Apabila

diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi kedua ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

a. Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif.

Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan dan efektifitas hasil pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja. Aspek pemerataan dan penciptaan lapangan kerja ini diwujudkan dalam prioritas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan pengembangan industri berbasis agro. Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Jawa Timur merupakan IKM. Pengembangan industri berbasis agro dimaksudkan agar industrialisasi memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

b. Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri

Pada bidang industri, kemandirian ekonomi diwujudkan dengan mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada bidang perdagangan, kemandirian tersebut diupayakan melalui penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kerjasama perdagangan dengan provinsi-provinsi lain melalui pembukaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Sampai tahun 2013, telah dibuka 26 KPD di berbagai provinsi mitra.

c. Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi

Daya saing sektor industri dan perdagangan Jawa Timur harus terus ditingkatkan mengingat sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah semakin tidak dapat dibatasi oleh hambatan-hambatan non-teknis. Keunggulan kompetitif dan komparatif dengan demikian menjadi kunci keberhasilan Jawa Timur dalam integrasi ekonomi global.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Terkait

3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2010-2014

Terdapat beberapa strategi pembangunan perdagangan yang ditempuh selama tahun 2010-2014, baik terkait perdagangan luar negeri maupun perdagangan dalam negeri. Terkait perdagangan luar negeri, strategi yang ditempuh yaitu:

- a. Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam serta memanfaatkan teknologi tingkat menengah.

Produk-produk ekspor yang didorong pengembangannya adalah produk hilir berbasis sumber daya alam, produk yang memiliki permintaan pasarnya besar, dan produk yang mendorong perluasan kesempatan kerja.

- b. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha kecil menengah (UKM).
- c. Mengupayakan diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tertentu dan mengupayakan melakukan ekspor pada negara tujuan akhir di mana produk akan dikonsumsi.
- d. Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.
- e. Mendorong pengembangan ekspor wilayah perbatasan yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- f. Memperkuat kelembagaan perdagangan luar negeri yang mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas.

Strategi pembangunan perdagangan luar negeri di atas dilaksanakan dalam beberapa fokus prioritas, yaitu:

- a. Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor
- b. Peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor
- c. Peningkatan fasilitasi ekspor

Sementara itu, terkait pembangunan perdagangan dalam negeri strategi yang ditempuh selama tahun 2010-2014 adalah:

- a. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga.
- b. Meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha.
- c. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi harga, pemanfaatan alternative pembiayaan, dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang.
- d. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa
- e. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlindungan konsumen serta menciptakan perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang yang efisien.

Strategi pembangunan perdagangan dalam negeri di atas dilaksanakan dalam beberapa fokus prioritas, yaitu:

- a. Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional
- b. Penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi
- c. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan

3.3.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2010-2014

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2010-2014, arah kebijakan pembangunan perindustrian mencakup beberapa hal pokok berikut:

- a. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional
- b. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah

- c. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar
- d. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa
- e. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain
- f. dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Arah kebijakan pembangunan perindustrian di atas diimplementasikan ke dalam beberapa program unggulan, antara lain:

- a. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Manufaktur
- b. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
- c. Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- d. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah
- e. Program Pengembangan Perwilayahan Industri
- f. Program Kerja Sama Industri Internasional
- g. Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan, Mutu Industri

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 yang berhubungan dengan bidang perindustrian dan perdagangan adalah penataan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri.

Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mengembangkan industri berdasarkan potensi sumber daya, jaringan infrastruktur, dan pasar melalui:

- a. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan wilayah, pemerataan, dan keberlanjutan;
- b. Pengidentifikasian potensi pengembangan industri;
- c. Pengembangan industri melalui penyediaan ruang dan didukung pengembangan infrastruktur wilayah;

- d. Pengembangan industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan;
- e. Pengembangan industri kecil, menengah, dan rumah tangga;
- f. Pengembangan perindustrian berdasarkan prinsip keterkaitan antara kegiatan hulu-hilir, klaster, dan sentra; dan
- g. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri.

Kawasan peruntukan industri tersebut meliputi:

- a. Kawasan Industri, dengan prioritas pengembangan meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kota Madiun, dan Kota Surabaya.
- b. Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dengan prioritas pengembangan meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Surabaya
- c. Sentra industri, direncanakan dikembangkan di seluruh kabupaten/kota

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta. Perkembangan luas kawasan industri di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan lahan yang tersedia. Sampai tahun 2013, realisasi luas kawasan industri yang dikembangkan di Jawa Timur baru mencapai 1.758 Ha, atau baru mencapai 0,05 persen dari yang direncanakan sebesar 0,21 persen untuk menampung seluruh

industri di Jawa Timur. Adapun luas Kawasan Industri yang telah dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2013 ditunjukkan pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1.
Luas Kawasan Industri yang Telah Dikembangkan di Jawa Timur Sampai 2013

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan Industri	Luas yang Dikembangkan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surabaya	Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	245
2	Sidoarjo	Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB)	87
3	Pasuruan	Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER)	500
4	Mojokerto	Ngoro Industrial Park 1 (NIP)	220
5	Mojokerto	Ngoro Industrial Park 2 (NIP)	230
6	Gresik	Maspion Industrial Estate	341
7	Gresik	Kawasan Indutri Gresik (KIG)	135
Jumlah			1.758

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

3.4.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, terdapat 9 (Sembilan) isu pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) belum optimalnya daya saing infrastruktur; (2) alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); (3) perubahan iklim; (4) penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam; (5) bencana alam; (6) belum optimalnya pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (7) distribusi energi dan energi terbarukan; (8) kesejahteraan rakyat; dan (9) pertanian dan ketahanan pangan.

Di antara kesembilan isu pembangunan berkelanjutan di atas, beberapa di antaranya terkait dengan sektor industri dan perdagangan, yaitu:

1) Belum optimalnya daya saing infrastruktur

Kondisi Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur pada saat ini patut diwaspadai, khususnya pada kondisi jaringan jalan yang mana jalan dengan kondisi baik ada pada 20% dari total panjang jalan yang ada, sedangkan untuk kondisi jembatan 94% sudah dalam kondisi baik, dan kondisi jaringan drainase 74% baik.

Perubahan kondisi infrastruktur secara umum memberikan dampak terhadap semua penduduk Provinsi Jawa Timur, karena infrastruktur merupakan barang

publik murni dengan sifat *non-excludable* (tanpa ada larangan) dan *non-rivalry* (tanpa persaingan) dimana semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya. Namun, secara khusus perubahan kondisi infrastruktur akan sangat berdampak kepada pihak-pihak yang bergerak pada sektor perekonomian seperti berikut:

- Investor penanam modal.
- Pelaku industri (besar, menengah, dan kecil).
- Pelaku industri pariwisata

2) Alih fungsi lahan (Hutan dan Pertanian)

Semakin tingginya aktivitas alih fungsi lahan khususnya pada hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kondisi ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dimana dampak positif adalah semakin meningkatnya laju pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin tingginya resiko bencana erosi dan banjir, menurunnya ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih yang semakin sedikit.

Kelompok masyarakat yang terkena dampak secara umum adalah seluruh penduduk Provinsi Jawa Timur. Secara khusus dampak dari pelaksanaan program tersebut akan berpengaruh terhadap: Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku stakeholders, pelaku industri dan pariwisata, dan petani (baik buruh tani maupun pemilik lahan).

3) Perubahan Iklim

Banyak rencana program dalam RPJMD Provinsi yang berdampak negatif terhadap elemen lingkungan terutama perubahan iklim. Rencana program tersebut umumnya meningkatkan kadar emisi GRK yang dilepaskan, sehingga perlu intervensi yang berupa upaya adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya.

4) Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam

Program pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Sebagian besar kegiatan industri misalnya, menghasilkan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air sungai dan gas buang yang mengakibatkan polusi udara. Dengan demikian, perlu perhatian sungguh-sungguh untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pembangunan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

5) Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan pembangunan industri dan perdagangan selama lima tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan program-program lain di bidang perindustrian merupakan program prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus terkait isu pembangunan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi pelaksanaan program tersebut disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.
Pengaruh Program Prioritas dan Rekomendasi Mitigasi/Adaptasi

Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		Rekomendasi
	Mitigasi/Adaptasi	Alternatif	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan program industri tanpa analisa ruang yang tepat dan efektif akan semakin memacu laju alih fungsi lahan. • Meningkatkan penyusutan luas lahan pertanian dan hutan/alih fungsi lahan • Meningkatkan konsumsi energi • Meningkatkan konsumsi air baku • Mengganggu keseimbangan ekosistem • Merusak habitat satwa • Meningkatkan pencemaran lingkungan akibat limbah industri • Mengurangi jumlah tenaga kerja potensial di bidang pertanian • Peningkatan produksi GRK 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan teknologi industri yang ramah lingkungan • Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk meminimalisir dampak limbah • Mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan • Perlu ditambahkan regulasi <i>law enforcement</i> regulasi • Penerapan konsep <i>polluters pay</i> bagi pengusaha industri • Perlu penetapan insentif dan disinsentif bagi pelaku industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri kecil menengah berbasis sumberdaya alam lokal • Mengembangkan industri pada kawasan non hutan/pertanian • Pengembangan industri dengan konsep industri bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya alam seperti model pengembangan agribisnis. • Pengembangan sentra industri dengan memperhatikan ekosistem lingkungan • Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten terkait penetapan lahan pertanian berkelanjutan dan kawasan lindung (rehabilitasi dan konservasi hutan) dengan perundang-undangan yang mengikat • Pengembangan teknologi industri yang ramah lingkungan • Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk meminimalisir dampak limbah • Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan • Pengembangan industri pada kawasan non hutan/pertanian • Pengembangan industri dengan konsep industri bersih • Penerapan konsep <i>polluters pay</i> bagi pengusaha industri serta penetapan insentif dan disinsentif bagi pelaku industri

3.5. Isu-Isu Strategis

Selama lima tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, baik isu strategis di tingkat internasional, regional, nasional, maupun provinsi.

3.5.1. Isu Internasional

3.5.1.1. Gejolak perekonomian global

Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan eksese gejala krisis global yang diawali dari Krisis Utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia.

Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi :

- Ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global.
- Ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebihan, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk Indonesia.
- Ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu/tidak pasti, nampaknya Pemerintah Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya di tahun 2013 ini karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang sedang menurun.

Berkembangnya ketiga isu global tersebut tentu tak terhindar akan menurunkan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (*tapering off quantitative easing*) oleh The Fed juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ditandai derasnya aliran modal asing yang keluar dan membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam.

3.5.1.2. Lingkungan hidup

Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

3.5.1.3. Millennium Development Goals (MDGs)

Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia di mana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidakpedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicetuskannya MDGs.

Sampai tahun 2015 diyakini bahwa MDGs belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDGs 2015. Agenda pembangunan Pasca-Millennium Development Goals (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Disepakati terdapat 12 agenda lanjutan Pasca MDGs 2015 yang harus ditindaklanjuti untuk diselesaikan oleh negara-negara yang berkomitmen terhadap MDGs. Ke-12 butir agenda itu adalah *pertama*, mengakhiri kemiskinan; *kedua*, meningkatkan pemberdayaan wanita dan mencapai kesetaraan gender; *ketiga*, menyediakan pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup; *keempat*, memastikan kesehatan yang layak; *kelima*, ketahanan pangan dan tercukupinya nutrisi; *keenam*, mencapai akses air minum dan sanitasi. Selanjutnya butir *ketujuh*, yaitu menjaga keberlanjutan ketersediaan energi; *kedelapan*, penciptaan lapangan kerja, mata pencarian keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil; *kesembilan*, pengelolaan aset sumber daya alam secara berkesinambungan; *kesepluluh*, memastikan terciptanya tata kelola yang efektif di pemerintahan dan lembaga; *kesebelas*, memastikan terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan damai; dan *keduabelas*, menciptakan lingkungan yang berdaya dengan pendanaan jangka panjang.

3.5.2. Isu Regional

Isu regional yang terkait dengan pembangunan industri dan perdagangan di Jawa Timur adalah adanya *Asean Economic Community* (AEC). AEC merupakan tantangan daya saing ekonomi nasional maupun Jawa Timur. Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi

ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1
Skema Lingkup AEC 2015

Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, dibutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (*preference*) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga

menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non–tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain–lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

3.5.3. Isu Nasional

3.5.3.1. Amanat Undang-Undang terkait Pembangunan Industri

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
- b. Pengembangan perwilayahan industri;
- c. Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional;
- e. Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri hijau (ramah lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional di bidang industri;
- f. Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

3.5.3.2. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah

dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

3.5.3.3. Kenaikan Upah Buruh dan Harga TDL untuk Industri

Upah buruh dan tarif dasar listrik yang semakin meningkat menjadi kendala tersendiri bagi sektor industri. Tarif dasar listrik untuk industri direncanakan naik secara bertahap mulai bulan Mei 2014 sehingga kenaikannya mencapai sekitar 38,9 persen sampai 64,7 persen pada tahun 2014. Kenaikan TDL dan tingkat upah buruh ini jelas mempengaruhi daya saing industri karena akan menaikkan biaya produksi.

3.5.4. Isu Jawa Timur

3.5.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Dalam konteks perindustrian dan perdagangan, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat diwujudkan dengan prioritas pengembangan IKM, industri agro, dan revitalisasi pasar tradisional.

3.5.4.2. Pengangguran

Pengangguran memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan

maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
- Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.
- Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

3.5.4.3. *Lingkungan Hidup*

Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sektor utama yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan sektor industri dan perdagangan yang akan dihadapi Provinsi Jawa Timur 2014-2019, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur 2014-2019 berangkat dari landasan visi:

"Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang **lebih berdaya saing global** dan **mandiri**".

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini merupakan pengejawantahan dari kondisi perekonomian dan Visi Provinsi Jawa Timur di mana selama beberapa tahun terakhir perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor industri dan subsektor perdagangan (sektor ini merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi), di samping itu inti dari visi tersebut adalah bagaimana mewujudkan industri dan perdagangan yang mandiri dan berdaya saing global.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di atas, ditempuh beberapa misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri.
- b. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas.
- c. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- d. Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pembangunan di sektor industri dan perdagangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Jawa Timur maupun PDB Nasional.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan perdagangan periode 2014-2019 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu:

Tujuan:

- **Meningkatkan daya saing industri manufaktur**

Sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor industri melalui strategi meningkatkan pengembangan sektor industri dan mengembangkan bahan baku substitusi impor

- **Meningkatkan kinerja ekspor non migas**

Sasaran : Meningkatnya net-ekspor non migas perdagangan luar negeri melalui strategi memperkuat & memperluas pasar luar negeri

- **Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri**

Sasaran : Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri strategi memperkuat & memperluas pasar dalam negeri

- **Meningkatkan tertib perdagangan**

Sasaran : Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui strategi meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran industri dan perdagangan lima tahun ke depan 2014-2019, maka dibutuhkan peta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan di atas: Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang lebih ***berdaya saing global*** dan ***mandiri***. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Jawa Timur untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi

dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan sektor industri dan perdagangan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah agro dan non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang tinggi;
2. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil;
3. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri;
4. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor;
5. Peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional;
6. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional;
7. Penumbuhan eksportir baru;
8. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang;
9. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;
10. Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang, kemetrolagian, serta pengawasan perdagangan barang & jasa ilegal

Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan sektor industri dan perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan dijabarkan dalam matrik pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Matriks Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri	Meningkatkan daya saing industri manufaktur	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri	Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah agro dan non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> yang tinggi
				Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil
				Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri
			Mengembangkan bahan baku substitusi impor	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor
Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas	Meningkatkan kinerja ekspor non migas	Meningkatnya net-ekspor non migas perdagangan luar negeri	Memperkuat & memperluas pasar luar negeri	Peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional
				Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional
				Penumbuhan eksportir baru
Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri	Memperkuat & memperluas pasar dalam negeri	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang
				Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi
Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatkan tertib perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk	Peningkatan pengujian/ sertifikasi mutu barang, kemetrolgian, serta pengawasan perdagangan barang & jasa ilegal

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 terdiri dari program-program yang menuncangi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Program ini mencakup urusan perindustrian dan urusan perdagangan serta program-program penunjang.

5.1. Urusan Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas untuk peningkatan daya saing.

b. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan teknis.

c. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan.

d. Program Peningkatan Standardisasi Industri

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah jumlah IKM yang mendapat fasilitas standarisasi industri.

e. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah nilai produksi industri agro (triliun rupiah).

f. Program Penataan Struktur Industri

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah luasan kawasan industri yang terpakai untuk kegiatan industri.

5.2. Urusan Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah net-ekspor non migas (milyar USD).

- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah net-ekspor perdagangan dalam negeri (Rp. triliun).

- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah jumlah standarisasi mutu barang dan alat ukur.

5.3. Program-Program Penunjang

Program penunjang terdiri dari:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- d. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah

Rincian rencana program sebagaimana tersebut di atas disajikan pada Tabel

5.1, Lampiran 1.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari:

Urusan Perindustrian:

- a. Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi untuk peningkatan daya saing
- b. Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan teknis.
- c. Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan.
- d. Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standardisasi industri.
- e. Nilai produksi industri agro.
- f. Luas kawasan industri yang terpakai untuk kegiatan industri

Urusan Perdagangan:

- a. Net-ekspor nonmigas (milyar USD)
- b. Net-ekspor perdagangan dalam negeri (Rp. triliun)
- c. Jumlah standardisasi mutu barang dan alat ukur

Rincian indikator sebagaimana tersebut di atas disajikan pada Tabel 6.1, Lampiran 2.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra ke dalam Renja SKPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan.